

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
JI. PRABU GEUSAN ULUN NO. 36 SUMEDANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 tahun 2019. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023 dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang selama tahun 2024.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Sumedang, 31 November 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja -SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Pelaksanaan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja BAKESBANGPOL
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja, Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Renja BAKESBANGPOL
 - Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021,Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi , serta telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
 - Perumusan tujuan dan sasaran, telaahan usulan program dan kegiatan, Perumusan kegiatan prioritas, Penyajian awal dokumen rancangan Renja.
 - Penyempurnaan rancangan Renja, Pembahasan forum SKPD, Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
- c. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD bertujuan untuk :

- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BAKESBANGPOL sesuai dengan tugas dan fungsi BAKESBANGPOL
- Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BAKESBANGPOL Tahun Anggaran 2024

d. Penyusunan dan Penetapan Renja BAKESBANGPOL Tahun 2024

- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BAKESBANGPOL Tahun 2024
- Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
- Pengesahan oleh Kepala Daerah
- Penetapan Renja oleh Kepala BAKESBANGPOL

Rencana Kerja BAKESBANGPOL Tahun 2024 memuat mengenai rencana kerja BAKESBANGPOL yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis BAKESBANGPOL Tahun 2024-2026 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yang mengarah pada pencapaian Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2024 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.1. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

33. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
34. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
38. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, LAPKON, REVIU LAKIP;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
53. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
57. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
58. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ..);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
64. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
65. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
69. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
70. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);
71. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);
72. Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
73. Peraturan Bupati nomor 196 tahun 2022 tentang uraian jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
74. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2);
75. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
76. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94).
77. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program

dan kegiatan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumem Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD kondisi kinerja pada akhir RPJMD serta Tindak lanjut proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kajian Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Mengukur sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi PD serta dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penjelasan mengenai alasan proses antara rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dalam catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Penjelasan tentang proses kesesuaian usulan program/kegiatan/sub kegiatan tentang usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tupoksi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Penjelasan tentang rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta tindak lanjut hasil dokumen pelaksanaan PD.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Pelaksanaan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada lampiran I.

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2022 sebesar 99,52%. Merujuk pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata					100%	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang

2.1.A TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Cipta Kondisi Kondusif” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya mengacu kepada Nilai Cipta Kondisi Kondusif Provinsi Jawa Barat yang mana realisasi kinerja sebesar 100%, dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan

dengan tahun 2023 capaian kinerja Cipta Kondisi Kondusif 100% dan tahun 2022 adalah 100%. Dalam Renstra 2024-2026 "Cipta Kondisi Kondusif" adalah 100%, dan realisasi dari target 100% tercapai di Tahun 2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama *Tingkat Cipta Kondisi Kondusif* 100% sampai dengan dari target 100% di Tahun 2023

1.) Penyebab Keberhasilan

- Situasi dan kondisi di masyarakat Kabupaten Sumedang yang terkenal dengan keramah tamahan dan nilai gotong royong sehingga berbagai macam persoalan atau perbedaan yang ditenggarai akan menyebabkan konflik dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi secara mekanisme musyawarah dan mufakat;

2.) Penyebab Kegagalan

- Walaupun situasi aman, tertib dan kondusif tidak ada konflik yang berarti ataupun menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pembangunan Daerah, tetapi ada sisi kelemahan atau kegagalan dimana situasi tidak ada konflik bisa berkontribusi optimal bila ada pembiayaan anggaran kegiatan yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
 3. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;Bila disimulasikan 3 Program yang tadi kami sebutkan sebagai sebuah lokomotif dalam kereta api pembangunan maka bila ketiga kegiatan tersebut dibiayai maka akan terjadi akselerasi pembangunan di kabupaten sumedang.

3.) Solusi

1. Dilakukan upaya dalam koordinasi secara intens baik terhadap para pengurus maupun melalui WA grup di Media Sosial.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti Rapat Koordinasi FORKOPIMDA dan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang memiliki keanggotaan seluruh Tim FORKOPIMDA (Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kodim, Kejari, Pengadilan Negeri dan Agama serta Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD di Kabupaten Sumedang) dan seluruh Camat di Kabupaten Sumedang, di dalam rakor yang diadakan setiap bulan disampaikan materi-materi dari

narasumber yang berkenaan Isu dan Permasalahan yang ada di Kabupaten Sumedang, selain itu dimintakan juga materi yang berkaitan dengan menciptakan Kabupaten Sumedang Kondisi Kondusif seperti tujuan dari *IKU "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif"*.

2.1.B Tingkat Bina Demokratisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Tingkat Bina Demokratisasi" tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi 100% dan tahun 2022 adalah 100%. Dalam Renstra 2018-2023 "Tingkat Bina Demokratisasi" adalah 100%, dan realisasi dari target 100% tercapai di Tahun 2023.

• Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades 80% sampai dengan dari target 80,65% di Tahun 2022

1.) Penyebab Keberhasilan

- Situasi dan kondisi di masyarakat Kabupaten Sumedang yang terkenal dengan keramah tamahan dan nilai gotong royong sehingga berbagai macam persoalan atau perbedaan yang ditenggarai akan menyebabkan konflik dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi secara mekanisme musyawarah dan mufakat;
- Tingginya tingkat kesadaran akan kewajiban anggota parpol dalam pelaporan partai politik;

2.) Penyebab Kegagalan

- Sulitnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengurus parpol yang akan di validasi dengan tersebar di berbagai Kecamatan
- Walaupun situasi aman, tertib dan kondusif tidak ada konflik yang berarti ataupun menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pembangunan Daerah, tetapi ada sisi kelemahan atau kegagalan dimana situasi tidak ada konflik bisa berkontribusi optimal bila ada pembiayaan anggaran kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Bila disimulasikan 1 Program yang tadi kami sebutkan sebagai sebuah lokomotif dalam kereta api pembangunan maka bila ketiga kegiatan

tersebut dibiayai maka akan terjadi akselerasi pembangunan di kabupaten sumedang.

3.)Solusi

- Dilakukan upaya dalam koordinasi secara intens baik terhadap para pengurus maupun melalui WA grup di Media Sosial dan Mengadakan pengecekan data parpol khususnya Pengurus parpol untuk dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka mendapatkan kepastian batuan keuangan parpol.

TABEL 2.1.a
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D DPPA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

11/9/23, 11:10 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD										
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023																				
Organisasi : 8.01.0.000.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN										
Jumlah																				
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8																				
8	01								11.912.152.880	583.125.200		0	0	12.495.278.080	13.541.457.139	625.433.290	0	0	14.166.890.429	1.671.612.349
8	01								3.773.686.880	583.125.200	0	0	4.356.812.080	3.768.667.739	625.433.290	0	0	4.394.101.029	37.288.949	
8	01	01																		
8	01	01	2.01						113.536.480	0	0	0	113.536.480	113.536.480	0	0	0	113.536.480	0	
8	01	01	2.01	01					40.245.300	0	0	0	40.245.300	40.245.300	0	0	0	40.245.300	0	
8	01	01	2.01	02					10.133.040	0	0	0	10.133.040	10.133.040	0	0	0	10.133.040	0	
8	01	01	2.01	03					6.349.940	0	0	0	6.349.940	6.349.940	0	0	0	6.349.940	0	
8	01	01	2.01	04					4.565.200	0	0	0	4.565.200	4.565.200	0	0	0	4.565.200	0	
8	01	01	2.01	05					5.888.200	0	0	0	5.888.200	5.888.200	0	0	0	5.888.200	0	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T-1	Bertambah/ (Berkurang)	T-1	
							T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)								
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Selatan, Kotakulon													
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		46,354,800	0	0	0	46,354,800	46,354,800	0	0	0	46,354,800	0	
8 01 01 2.01 06																				
8 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,364,123,080	0	0	0	2,364,123,080	2,285,735,429	0	0	0	2,285,735,429	(78,387,651)	
					ASLI DAERAH (PAD)		Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon													
8 01 01 2.02 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		2,340,706,080	0	0	0	2,340,706,080	2,262,318,429	0	0	0	2,262,318,429	(78,387,651)	
					Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)															
8 01 01 2.02 03						Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		8,180,700	0	0	0	8,180,700	8,180,700	0	0	0	8,180,700	0	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)															
8 01 01 2.02 07						Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		15,236,300	0	0	0	15,236,300	15,236,300	0	0	0	15,236,300	0	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,002,900	0	0	0	5,002,900	5,002,900	0	0	0	5,002,900	0	
8 01 01 2.05					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		5,002,900	0	0	0	5,002,900	5,002,900	0	0	0	5,002,900	0	
8 01 01 2.05 03																				
8 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				366,400,340	50,000,000	0	0	416,400,340	442,816,490	12,369,500	0	0	455,185,990	38,785,650	
8 01 01 2.06 02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		34,663,500	0	0	0	34,663,500	49,826,280	12,369,500	0	0	62,195,780	27,532,280	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T-1	Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
							T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)								
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Selatan, Kotakulon													
8	01	01	2.06	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		11,168,200	0	0	0	11,168,200	20,971,290	0	0	0	20,971,290	9,803,090	
					Persediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		116,174,240	0	0	0	116,174,240	116,174,240	0	0	0	116,174,240	0	
8	01	01	2.06	05	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		37,975,400	0	0	0	37,975,400	40,841,700	0	0	0	40,841,700	2,866,300	
8	01	01	2.06	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		14,964,000	0	0	0	14,964,000	14,964,000	0	0	0	14,964,000	0	
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		150,025,000	0	0	0	150,025,000	200,039,000	0	0	0	200,039,000	50,014,000	
8	01	01	2.06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		1,410,000	50,000,000	0	0	51,410,000	0	0	0	0	0	(51,430,000)	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,310,000	533,125,200	0	0	0	536,435,200	6,170,000	613,063,790	0	0	619,233,790	82,798,590	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		1,880,000	480,000,000	0	0	481,880,000	1,880,000	530,000,000	0	0	531,880,000	50,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
8 01 02 2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				160.000.000	0	0	0	160.000.000	225.000.000	0	0	0	225.000.000	65.000.000	
8 01 02 2.01 03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		160.000.000	0	0	0	160.000.000	225.000.000	0	0	0	225.000.000	65.000.000	
8 01 03					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.754.492.000	0	0	0	3.754.492.000	2.854.492.000	0	0	0	2.854.492.000	(900.000.000)	
8 01 03 2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik				3.754.492.000	0	0	0	3.754.492.000	2.854.492.000	0	0	0	2.854.492.000	(900.000.000)	
8 01 03 2.01 03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		3.404.492.000	0	0	0	3.404.492.000	2.504.492.000	0	0	0	2.504.492.000	(900.000.000)	
8 01 03 2.01 04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		350.000.000	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Selatani, Kotakulon													
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				100.000.000	0	0	0	100.000.000	330.000.000	0	0	0	330.000.000	230.000.000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100.000.000	0	0	0	100.000.000	330.000.000	0	0	0	330.000.000	230.000.000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singgela Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		100.000.000	0	0	0	100.000.000	330.000.000	0	0	0	330.000.000	230.000.000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				325.000.000	0	0	0	325.000.000	325.000.000	0	0	0	325.000.000	0	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				325.000.000	0	0	0	325.000.000	325.000.000	0	0	0	325.000.000	0	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyediaan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon		125.000.000	0	0	0	125.000.000	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0	

TABEL 2.1.b
Realisasi Capaian Kinerja (SIEVK) Bakesbangpol Triwulan III Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, target yang harus di upayakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang meliputi 5 (Lima) Indikator sebagai berikut :

1. TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,

Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :
- 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

2. TINGKAT BINA DEMOKRATISASI

a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

4. SAKIP PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.2.a
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI RENSTRA 2018-2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG

Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD	Target Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD		Tujuan Perangkat Daerah/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan pada Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah		
	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat TingkatCipta Kondisi Kondusif	72.2 poin	74,5 poin	Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,2 poin (N.a)	72,2 poin (N.a)	72,2poin (N.a)
	100%	100%		TingkatCipta Kondisi Kondusif	100 %	100 %	100 %

Meningkatkan partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	80,60%	80,65%		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilkada, Pilkades	80,65%	79%	80%
Tingkat Ormas yang dibina kategori aktif	100%	100%		Tingkat Ormas yang dibina kategori aktif	100%	100%	100%

TABEL 2.2.b
 TARGET KINERJA PELAYANAN SESUAI P. RENSTRA 2018-2023
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMEDANG

Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD	Target Indikator Kinerja Tujuan pada P RPJMD		Tujuan Perangkat Daerah/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan pada Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	
	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)			Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	100%	100%	Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis	Tingkat Cipta Kondusif	100%	100%
Meningkatkan partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	100%	100%		Tingkat Bina Demokratisasi	100%	100%

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Permasalahan dalam Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 3) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat;
2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal;
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
4. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi;
5. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati ,dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnya tuntutan ganti rugi;
6. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah;
7. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertikal tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan;
8. Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%;

9. Kondusifitas Daerah tetap terjaga Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari – hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis;
10. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP
11. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
12. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
13. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
14. Gangguan PEKAT masih tinggi
15. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
16. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
17. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial
18. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
19. Peran ormas di masyarakat belum optimal
20. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial
21. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
22. Belum terbentuknya sistem informasi ormas

23. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
24. Sinergitas antar lembaga masih kurang
25. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, dan parpol
26. Belum optimalnya pendidikan politik
27. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Perencanaan anggaran awal tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2024 dengan rencana anggaran awal dan hasil pemutakhiranyang dilaksanakan prosesnya dalam awal tahun (Semester 1) tahun 2023. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 terhadap Rancangan Awal RKPD pada pendanaan APBD Sebesar Rp. 9,139,557,708.00 dan Hasil Analisis Kebutuhan Rp. 18,878,769,988.00 dan dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut :

Tabel 2.3
RANCANGAN AWAL RKPD DAN HASIL ANALIS KEBUTUHAN
TAHUN 2024

RUMUSAN RENCANA USULAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN
DALAM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/Berkurang	Sumber Pendanaan (APBD Kab/Banprov)	Tagging Aktivitas Sub Kegiatan (7)	Catatan Penting (alasan penambahan/pergeseran antar sub kegiatan) (8)
(1)	(2)	Rancangan RKPD/Renja PD (3)	Rancangan Akhir RKPD/Renja PD (4)				
Urusan Kesatuan Bangsa							
8.01.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.840.313.888,00	73.787.835.762,00	-		-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	4.792.993.288,00	4.952.993.362,00	-	APBD Kab	-	-
	PEMERINTAHAN DAERAH	4.792.993.288,00	4.952.993.362,00	-	APBD Kab	-	-
8.1.1.2.01	KABUPATEN/KOTA						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	125.391.208,00	113.449.200,00	11.942.008,00	APBD Kab	-	
	Kinerja Perangkat Daerah						
8.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	44.270.000,00	42.997.200,00	1.272.800,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.02	Perangkat Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.146.000,00	9.452.500,00	1.693.500,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.985.000,00	5.985.000,00	1.000.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.022.000,00	4.322.500,00	699.500,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.477.000,00	6.270.000,00	207.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.491.208,00	44.422.000,00	7.069.208,00	APBD Kab		

8.1.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.022.000,00	4.322.500,00	699.500,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.477.000,00	6.270.000,00	207.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.491.208,00	44.422.000,00	7.069.208,00	APBD Kab		
8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.370.706.080,00	2.357.119.162,00	13.586.918,00	APBD Kab		
8.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.340.706.080,00	2.316.411.862,00	24.294.218,00	APBD Kab		
8.1.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	20.187.500,00	10.187.500,00	APBD Kab		
8.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	20.000.000,00	20.519.800,00	519.800,00	APBD Kab		
8.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	25.140.600,00	24.859.400,00	APBD Kab		
8.1.1.2.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	25.140.600,00	24.859.400,00	APBD Kab		
8.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.000.000,00	139.308.000,00	48.692.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.05.01	Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	38.308.000,00	11.692.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.1.1.2.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000,00	8.000.000,00	-	APBD Kab		
8.1.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00	93.000.000,00	37.000.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.436.000,00	581.978.900,00	91.542.900,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	31.037.300,00	8.962.700,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	12.849.700,00	2.150.300,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,00	152.081.200,00	22.081.200,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	32.556.800,00	12.443.200,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.460.000,00	11.760.000,00	4.700.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.403.000,00	229.982.000,00	52.579.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.1.1.2.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	11.711.900,00	1.711.900,00	APBD Kab		
8.1.1.2.06.08		56.573.000,00	100.000.000,00	43.427.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak

8.1.1.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.573.000,00	100.000.000,00	-	43.427.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.000.000,00	504.257.500,00	-	64.257.500,00	APBD Kab	-	Comand Center dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.1.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	150.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
01.02.07.05	Pengadaan Mebel	90.000.000,00	48.134.000,00		41.866.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	106.123.500,00	-	6.123.500,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	200.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.460.000,00	728.258.000,00	-	20.202.000,00	APBD Kab	-	
8.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	42.528.000,00		17.472.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	51.530.000,00		28.470.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	608.460.000,00	634.200.000,00	-	25.740.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.000.000,00	503.482.000,00	-	123.482.000,00	APBD Kab	-	
8.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	288.532.000,00	-	138.532.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	35.050.000,00		14.950.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00		100.000,00	APBD Kab		
8.1.1.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00		-	APBD Kab		

57	URUSAN			7.047.320.600,00	68.834.842.400,00	-	8.351.599.200,00	APBD Kab			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.100.000.000,00	750.000.000,00		150.000.000,00	APBD Kab			
58											
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.100.000.000,00	750.000.000,00		150.000.000,00	APBD Kab			
59											
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			100.000.000,00				APBD Kab			
60											
	Pembentukan Model Kelurahan Pembauran			100.000.000,00				APBD Kab			
61											
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.000.000.000,00	750.000.000,00		150.000.000,00	APBD Kab			
62											
	Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)			50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab			
63											
	Bintek Wawasan Kebangsaan			50.000.000,00	50.000.000,00			APBD Kab			
64											
	dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda			50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab			
65											
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga adat dan Budaya di Kabupaten Sumedang			50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab			
66											
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka			500.000.000,00	500.000.000,00		-	APBD Kab			
67											
	Pemilihan Duta Pancasila			50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab			
68											
	Kemah Pembauran Kebangsaan			100.000.000,00	100.000.000,00		-	APBD Kab			
69											
	Hibah FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN SUMEDANG						-				
70											
	Penguatan Duta Bela Negara			50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab			Dalam rangka PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024
71											
	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan terhadap Forum Strategis			100.000.000,00	100.000.000,00		-	APBD Kab			Dalam rangka PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024
72											

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	515.000.000,00	335.715.300,00	-	54.284.700,00	APBD Kab	-	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	515.000.000,00	335.715.300,00	-	54.284.700,00	APBD Kab	-	-
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	-	-	-	APBD Kab	-	-
	Penyusunan produk hukum di bidang Ormas	30.000.000,00				APBD Kab		
	Sosialisasi aplikasi SIORMAS dan SIPP	20.000.000,00				APBD Kab		
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75.000.000,00	95.165.600,00	-	95.165.600,00	APBD Kab	-	-
	Bintek peningkatan Kapasitas Ormas dalam Rangka PEMILU 2024 Kabupaten Sumedang	-	95.165.600,00	-	95.165.600,00	APBD Kab	-	Dalam rangka PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024
	Jambore Ormas	75.000.000,00				APBD Kab		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	390.000.000,00	240.549.700,00	-	149.450.300,00	APBD Kab	-	-
	Pengawasan Ormas	40.000.000,00		-	40.000.000,00	APBD Kab		
	Validasi Ormas	50.000.000,00		-	50.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaporan Ormas	50.000.000,00		-	50.000.000,00	APBD Kab		
	Safari Ormas dalam Rangka Pembinaan Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	APBD Kab		
	Hibah PERKUMPULAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG "INSUN MEDAL"			-	-			
	Hibah PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA			-	-			
	Fasilitasi kegiatan operasional Ormas	150.000.000,00	140.549.700,00	-	9.450.300,00	APBD Kab	-	Dalam rangka PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	220.000.000,00	200.000.000,00	65.000.000,00	APBD Kab	-	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	220.000.000,00	200.000.000,00	65.000.000,00	APBD Kab	-	-
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD Kab	-	-
	Forum Rencana aksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD Kab	-	-
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD Kab	-	-
	Fasilitas Tes Urine ASN	60.000.000,00	-	-	APBD Kab	-	-
	Optimalisasi ketahanan IPOLEKSOSBUD dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA di Kabupaten Sumedang	0	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab	-	Dalam rangka PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD Kab	-	-
	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	125.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD Kab	-	-
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	APBD Kab	-	-
	Hibah FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG	-	-	-	-	-	-
	Hibah BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG	-	-	-	-	-	-
	Monev Ketahanan Ekonomi Masyarakat di masa PEMILU 2024 dan PILKADA Serentak	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	APBD Kab	-	dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	4.267.299.100,00	13.050.000.000,00	-	8.682.700.900,00	APBD Kab	-	-
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	4.267.299.100,00	13.050.000.000,00	-	8.682.700.900,00	APBD Kab	-	-
8.01.06.2.01.03	Pemantapan Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Forum Koordinasi Pencegahan	2.257.299.100,00	2.000.000.000,00	-	257.299.100,00	APBD Kab	-	-
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab		
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	50.000.000,00			50.000.000,00	APBD Kab		
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	150.000.000,00	350.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PIL KADA Serentak
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024		350.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PIL KADA Serentak
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	328.871.100,00	1.200.000.000,00	-	271.128.300,00	APBD Kab		
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	328.428.000,00			928.428.000,00	APBD Kab		
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	50.000.000,00	100.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD Kab		
	Peminaan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam rangka Fasilitasi PEMILU serentak tahun 2024	100.000.000,00			100.000.000,00	APBD Kab		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	APBD Kab	-	-
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	335.000.000,00	9.050.000.000,00	-	8.615.000.000,00	APBD Kab	-	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	75.000.000,00	50.000.000,00		25.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	75.000.000,00	100.000.000,00			APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	100.000.000,00			100.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	100.000.000,00			100.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	30.000.000,00			30.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial	30.000.000,00			30.000.000,00	APBD Kab		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial		7.400.000.000,00	-	7.400.000.000,00			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial		1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial				-			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Rakor Penanganan Konflik Sosial				-			

8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	APBD Kab	-	-
	Penguatan Forkopimda	100.000.000,00		500.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	945.021.500,00	54.499.127.100,00	300.386.400,00	APBD Kab	-	dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	945.021.500,00	54.499.127.100,00	300.386.400,00	APBD Kab	-	-
8.01.03.2.01.0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	435.021.500,00	53.899.127.000,00	390.386.500,00	APBD Kab	-	-
	Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D)	100.021.500,00		100.021.500,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
	Fasilitasi Pemantauan PEMILU dan PILKADA Serentak 2024			-	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
	Sosialisasi pemilu pemula, pemuda, perempuan, tokoh Agama, Ormas dan Disabilitas	200.000.000,00		200.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
	Kemitraan Partai Politik	60.000.000,00	44.635.000,00	15.365.000,00	APBD Kab		
	Jambore Partai Politik	75.000.000,00		75.000.000,00	APBD Kab		
	Hibah Kepada Partai Politik	1.854.492.000,00	1.854.492.000,00	-			
	Hibah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00			
8.01.03.2.01.0	Hibah Komisi Pemilihan Umum Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	410.000.000,00	200.000.100,00	209.999.900,00	APBD Kab	-	-
	Penelitian Bantuan Keuangan Partai Politik	60.000.000,00	50.000.100,00	9.999.900,00	APBD Kab		
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah Gebyar Deklarasi Damai PILKADA	50.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab		dalam rangka Fasilitas Pemilu 2024 dan PILKADA Serentak
	Lokakarya Pelaksanaan PEMILU 2024 (Penyelenggara Pemilu, Ormas dan lembaga vertical di Kabupaten Sumedang)	300.000.000,00		300.000.000,00	APBD Kab		

8.01.03.2.01.0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100.000.000,00	400.000.000,00	-	300.000.000,00	APBD Kab	-	-
	Pembayaran BPJS Ketenagaaan Kerja PEMILU	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00			
	Fasilitasi NPHD bagi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	100.000.000,00			100.000.000,00	APBD Kab		
		11.840.313.888,00	73.787.835.762,00	-	8.511.599.274,00	-	-	-

TABEL 2.4
 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
 KABUPATEN SUMEDANG APBD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
8.01.03.2.01.03	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	53.854.492.000,00
	KPU	44.000.000.000,00
	BAWASLU	8.000.000.000,00
	DEMOKRAT	
	GERINDRA	119.487.000,00
	PAN	280.659.000,00
	GOLKAR	158.868.000,00
	PDI P	273.831.000,00
		399.081.000,00

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
	PKB	169.149.000,00
	PKS	187.245.000,00
	PPP	266.172.000,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.900.000.000,00
	KODIM 0610	1.500.000.000,00
	POLRES	7.400.000.000,00
	JUMLAH	62.754.492.000,00

Tabel 2.5
Berita Acara Hasil Forum SKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG**

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dari Drs. Asep Tatang Sujana, M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);
2. Pemaparan materi :
 - a. Yanti Siti Nurhayati (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
 - b. H. Endang Taufik Faturrahman (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
 - c. Drs. M. Endang Sirodjudin (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
 - d. Dra. Mety Supriyati, M.Si (Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumedang);
 - e. Deni Suhandani, S.Si., M.Si (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumedang);
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh fasilitator sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusankelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023

J a m : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 :

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati Program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah ;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

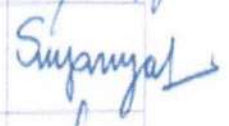
KETIGA : Menyepakati Daftar usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang ini, dan,

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	M. EUDANDUS	DPRD		
2.	Mely. S	Unsur Bapppeda		
3.	Yan Yan.	Unsur Perangkat Daerah		
4.	Dian Noviana	Unsur Instansi Vertical	KPU 5 Sumedang	
5.	Hodijah	FDM	Smd selatan	
6.	Elga Adhitya	Unsur Masyarakat	GOLKAR	
7.	Arriansyah	Unsur Masyarakat	Gerindra	
8.		Unsur Masyarakat		

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANGTAHUN 2024 – 2026**

Pada hari Rabu tanggal Satu sampai dengan hari Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

a. Pemaparan materi :

1. Yanti Siti Nurhayati (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
2. H. Endang Taufik Faturrahman (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
3. Drs. M. Endang Sirodjudin (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
4. Drs. Asep Tatang Sujana, M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang);
5. Dra. Mety Supriyati, M.Si (Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumedang);
6. Deni Suhandani, S.Si., M.Si (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumedang);

b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023

J a m : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang

Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang :

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun yang disertai dengan target dan Tahun 2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III beritaacara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV benta acara ini.
- KEEMPAT:Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Benta acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Demikian benta acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
SELUKU PIMPINAN SIDANG FORUM,

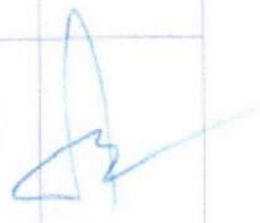

Dis. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Hwan Permana	FKD 082123907364	Kebun	
2	A Dadan Setawan	FKDM 081224038789	Ketua	
3	H. BUDIANTO, Mpd.	FKUB Sumedang	Sekretaris	

Catatan:
*) hapus yang tidak perlu

DAFTAR HADIR NARASUMBER
FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PENYEMPURAAAN RENSTRA TAHUN 2024-20226
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

NO	Nama	Instansi/ Lembaga	Alamat	Tanda Tangan
1.	M ENDANG SIRJUDIN	DPRD Sumedang		
2.	Endang Taufiq	DPRD Sumedang		
3.	ganti su	DPRD Sumedang		
4.	Mety. S	BAPPPEDA Kabupaten Sumedang		
5.	Devi	BAPPPEDA Kabupaten Sumedang		
6.	Asep Triangg S	BAKESBANGPOL Kabupaten Sumedang		

Sumedang, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG



Drs: H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

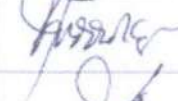
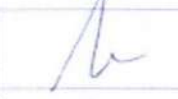
- a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah dan Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah

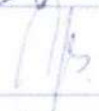
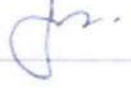
LAMPIRAN I

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B- / /II/2023
TANGGAL : 1 Maret 2023

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Maret 2023
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1	Asp Nasihin	PKS	Jl. P. Surti No 24 081394464905	
2	KEP SUPARDI	Polres	Jl. P. GA Smd	
3	Hodijah	FDM	SMD Selatan	
4	Darnilam	FKP	Angsrah 082217279000	
5	Lin. Purnasari	FDM	SMD Utara	
6	Ade Ratna Dewi	FDM SITURAJA	SITURAJA	
7	M. Engang. S	DPRD		
8	Endang Triutis	DPRD		
9	A Rondah	Bapppeda		
10	Rina. R	Bapppeda		
11	Mety. S	Bapppeda		
12	Devi M	Bapppeda		
13	Devi	Bapppeda	Gumery	
14	HERMAWAN	FKO	PASOH	
15	IRWAN PERMATA	FKO	Sumedang Utara	
16	SUTISNA	Kotamadya	SMD	
17	Kurwito	PKB	SMP 082128391141	
18	Dian Nuriyana	KPU SMD	08232420016	

19	H. Bubiaca	Flurb	08221955348	
20	Banueti P	Banueh		
21	Farimah A.	Pasch	085293696320	
22	Elga. A	Golkar	08112100570	
23	Dani. Ahmad. S	DAN	082119601301	
24	Tyaly. Komariah	FDM Komahideta	08522227532	
25	Wiwaki DS	DEMOKRAT	082315900255	
26	Arrian S/tn	Cerinda	08221135753	
27	A. Dadan Setiawan	FKOM	081724030389	
28	HERDI	PPP	082126592816	
29	Tampan	Kec. Suwilela	082118671055	
30	Iyem RM	Banueh	08248545856	
31	RI UTAMI YULIANI	BELAKHATI KEC	085167200231	
32	A.N.	F/nd	081214546445	
33				
34				
35				

Sumedang, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG



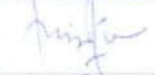
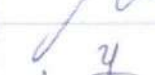
Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

a. Format Daftar Hadir Peserta dan Daftar Delegasi Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B- / /II/2023
TANGGAL : 1 Maret 2023

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Maret 2023
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1	ASEP NASIHIN	PKS	Jl. P. Santre 24 081394464905	
2	ASEP SUPAIDI	Polres	Jl. P. GA Sud	
3	Hokijal	FDm	Sud gelata	
4	Darini Lani	FPE	Anggali	
5	Li. Purnawati	FDm	Sud Utara	
6	Ade Ratna Dewi's	FDm	Sitursaja	
7	M. Erbang . S	DPRD		
8	Eudang Purjo	DPRD		
9	A. Rosidali	Bappeda		
10	. P. R. E. .	Bappeda		
11	Muz. S	Bappeda		
12	Des. M	Bappeda		
13	Desi	Bappeda	Sumber	
14	HERMAWAN	FKO	PASEH	
15	IRWAN PERMANA	FKO	SUMEDANG	
16	SWATIENIA	Korim	SMD	
17	Karwito	Plas	SMD	
18	Dian Novian	KPU SMD	SMD	

19	a. Pulisane	Hub	0822/1353411	
20	Dedy	Bendah		
21	Fatimah A.	Pasah	08579369000	
22	ELGA, A.	Golkar	08112100520	
23	Dani. Anwar, >	PAN	082119601301	
24	Yayah. Komarudin	FOR Himpunan	085222229532	
25	W. W. Gici	DEMOKRAI	082515900255	
26	Arifansyah	Gerindra	082271555753	
27	A. Roder. Sutawan	PKOW	081724038789	
28	Heredi	PPP	0821265584	
29	Tanyan Cahyana	Kec. and. Kelu	082118671011	
30	Iyda Ruz	Burhan	082845856	
31	TRI UTAMI TANUWI	DELEGASI KEC	085157200251	
32	Hani Sella	Lhca	0812175266	
33				
34				
35				

Sumedang, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

NIP. 19660228 199901 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun no. 36 Telepon : (0261) 207349 KP.Sumedang : 45311

NOTULEN KEGIATAN

Kepada : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang
Dari : Anang Mulyadi
Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Perihal : **Laporan Hasil Kegiatan Forum PD tahun 2024 Bakesbangpol dalam Penyempurnaan awal Renstra tahun 2024-2026 dan Rancangan awal Renja tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Sumedang**

1.) Latar belakang :

Telah dilaksanakan Kegiatan Forum PD tahun 2024 Bakesbangpol dalam Penyempurnaan awal Renstra tahun 2024-2026 dan Rancangan awal Renja tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Sumedang yang bertempat di Aula Rapat Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.

2.) a. Narasumber kegiatan :

1. Yanti Siti Nurhayati (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
2. H. Endang Taufik Faturrahman (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
3. Drs. M. ENDANG SIRODJUDIN (Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang);
4. Drs. Asep Tatang Sujana (Kepala Badan Kesbangpol);
5. Dra. Mety Supriyati, M.Si (Kabid PPM Bapppeda Kabupaten Sumedang);
6. Deni Suhandani, S.Si., M.Si (Jafung perencanaan Bapppeda Kabupaten Sumedang);
7. Hodijah (perwakilan FDM Kabupaten Sumedang)/Moderator diskusi PD Bakesbangpol tahun 2024

b. Peserta yang Hadir :

1. Kabid Idewasbang Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;
2. Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;
3. Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;
4. Kasubag Umum dan Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;
5. Pengelola Program, keuangan dan perencanaan Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;
6. Perwakilan Forum Kemitraan Ormas (FKO);
7. Perwakilan PaRpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang;
8. Perwakilan Forum strategis (FKDM, FKUB dan FPK).

9. Perwakilan SKPD Kabupaten Sumedang (BAPPPEDA dan Kecamatan Sumedang Selatan;
10. Perwakilan instansi vertikal (Polres, Kodim 0610, KPUD, Bawaslu dan Kejari Sumedang)

3.) Hasil Kegiatan Rapat Pembahasan meliputi :

- IKU Bakesbangpol tahun 2024 :
 - a. Tingkat cipta kondisi kondusif
 - b. Tingkat bina demokratisasi
 - c. Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
 - d. Nilai sakin perangkat daerah
- Sasaran Perangkat Daerah tahun 2024 :
 - a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
 - b. Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan bermasyarakat
 - c. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah
- Isu Strategis Bakesbangpol dari Rpd Kabupaten Sumedang (Isu Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan) :
 - Belum Optimalnya tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE);
 - Belum optimalnya penguatan penegakan regulasi daerah;
- Pagu Indikatif Sektoral Tahun 2024 :
 - Gaji + tunjangan = Rp 2.340.706.080
 - Adum = Rp 2.452.287.208
 - Urusan = Rp 8.951.812.600
 - Total = Rp 13.744.805.888
 - Usulan hibah tahun 2024 = Rp 105.107.531.725
 - Jumlah total = Rp 118.852.337.613

4.) Kesimpulan/Rekomendasi :

A. DPRD Kabupaten Sumedang (H. Endang Sirodjudin)

- Perencanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 di Bakesbangpol bisa terakomodir/terrealisasi dengan baik;
- Komisi 1 DPRD Kab. Sumedang akan mengawal pagu anggaran tahun 2024 khususnya Dana anggaran untuk Pemilu dan Pilkada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang;

B. KABID PPM BAPPPEDA

- *Indeks Pembangunan Manusia* adalah Indikator Target Makro Bakesbangpol di RPD tahun 2024 Kabupaten Sumedang;
- Untuk verifikasi/asistensi anggaran harus menjelaskan dari Program sampai dengan aktivitas sub kegiatan;

C. FDM KABUPATEN SUMEDANG

- Bakesbangpol tidak mengalokasikan PIK dalam pagu anggaran Renja tahun 2024:
 - Pagu anggaran menyesuaikan terhadap jumlah total pagu di program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut (Kabid Poldagri)
 - Sosialisasi diterapkan di aplikasi website dengan menabuh kolom menu di aplikasinya, serta pelaksanaan sosialisasi aplikasinya belum bisa terealisasi karena aplikasi tersebut belum terbangun; (Kabid Poldagri)
 - Sistem sosialisasi aplikasi (SIORMAS) akan masuk di aplikasi Academy di menu SIMPATI; (Jafung perencanaan Bapeda)

D. KODIM 0610 SUMEDANG

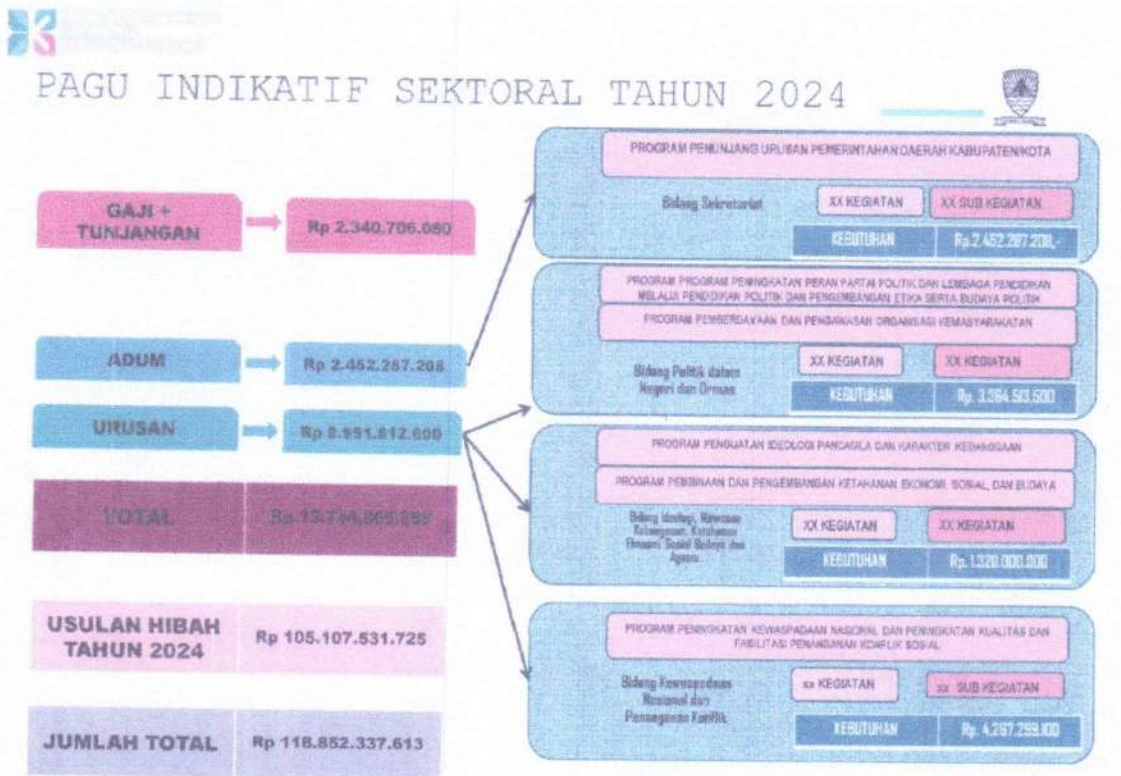
- Untuk menjaga Kondusifitas di Daerah dalam kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah, dimohon untuk jumlah anggaran dan tagret harus bisa lebih luas/ besar dalam persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 :
 - Meningkatkan kerjasama dengan Instansi Pemda dalam menjelang Pemilu dan Pilkada, karena eskalasi akan timbul di tahun 2023 sebelum pelaksanaan;

Demikian laporan yang dapat di sampaikan dan untuk menjadi bahan seperlunya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



ANANG MULYADI



Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Baseline	Target Kinerja	Page Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Kesatuan Bangsa					13.744.895.888,00			13.744.895.888,00
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang			4.792.993.288,00			4.792.993.288,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sumedang	Nilai SAKIP perangkat daerah	100%	4.792.993.288,00			4.792.993.288,00
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	125.391.208,00			125.391.208,00
8.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	44.270.300,00			44.270.300,00
8.1.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.148.000,00			11.148.000,00
8.1.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.985.000,00			6.985.000,00
8.1.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.022.000,00			5.022.000,00
8.1.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.477.000,00			5.477.000,00
8.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	51.491.208,00			51.491.208,00
8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Laporan	2.376.708.088,00			2.376.708.088,00
8.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.340.706.080,00			2.340.706.080,00
8.1.1.2.02.03	Pelektasan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	10.000.000,00			10.000.000,00
8.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	20.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Baseline	Target Kinerja	Page Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	50.000.000,00			50.000.000,00
8.1.1.2.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00			50.000.000,00
8.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 dokumen	158.006.000,00			158.006.000,00
8.1.1.2.05.01	Pengadaan Paket Dinas Beserta Akribat Kepegawaian	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Akribat Kepegawaian	1 Paket	50.000.000,00			50.000.000,00
8.1.1.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	8.000.000,00			8.000.000,00
8.1.1.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sumedang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	130.000.000,00			130.000.000,00
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 laporan	490.436.000,00			490.436.000,00
8.1.1.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000,00			40.000.000,00
8.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	15.000.000,00			15.000.000,00
8.1.1.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	130.000.000,00			130.000.000,00
8.1.1.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 paket	45.000.000,00			45.000.000,00
8.1.1.2.06.05	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.400.000,00			16.400.000,00
8.1.1.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	177.403.000,00			177.403.000,00
8.1.1.2.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00			10.000.000,00
8.1.1.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	56.573.000,00			56.573.000,00
8.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	448.000.000,00			448.000.000,00
8.1.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	100.000.000,00			100.000.000,00
01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sumedang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	90.000.000,00			90.000.000,00
8.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	100.000.000,00			100.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kepolisian Sub Kabupaten/Instansi Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Ragu Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	150.000.000,00			150.000.000,00
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	743.469.008,00			743.469.008,00
8.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000,00			60.000.000,00
8.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000,00			80.000.000,00
8.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	608.469.008,00			608.469.008,00
8.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	388.000.000,00			388.000.000,00
8.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personir Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Personirnya	5 unit	150.000.000,00			150.000.000,00
8.1.1.2.09.02	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000,00			50.000.000,00
8.1.1.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00			100.000.000,00
8.1.1.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	80.000.000,00			80.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kabupaten Sumedang			8.951.812.800,00			8.951.812.800,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kabupaten Sumedang	Pertepatan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan perumusan kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	2 laporan	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	1 dokumen	100.000.000,00			100.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kepolisian Sub Kabupaten/Instansi Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Ragu Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembentukan Model Kelurahan Pembauran	Kabupaten Sumedang	Jumlah dokumen	2	100.000.000,00			100.000.000,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	965 orang	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00
	Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	65	50.000.000,00			50.000.000,00
	Bineka Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	50.000.000,00			50.000.000,00
	Jalan Rangka Sumpah Pemuda	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	150	50.000.000,00			50.000.000,00
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga adat dan Budaya di Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	50	50.000.000,00			50.000.000,00
	Pengembangan Sekolah dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	600	500.000.000,00			500.000.000,00
	Pemilihan Duta Pancasila	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	50	50.000.000,00			50.000.000,00
	Kemah Pembauran Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	100.000.000,00			100.000.000,00
	Bela Negara	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	200	50.000.000,00			50.000.000,00
	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan terhadap Forum Strategis	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	150	100.000.000,00			100.000.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Sumedang	Jumlah Ormas yang di bina kutheng aktif		588.000.000,00			588.000.000,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	588.000.000,00			588.000.000,00
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Kabupaten di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 dokumen	50.000.000,00			50.000.000,00
	Penyusunan produk hukum di bidang Ormas	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup	1	30.000.000,00			30.000.000,00
	Eksistensi aplikasi SIORMAS dan SIPP	Kabupaten Sumedang	Jumlah aplikasi	2	20.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Pagu Indikatif			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembentukan Model Kelurahan Pembinaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah dokumen	2	100.000.000,00			100.000.000,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejatin Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejatin Kebangsaan	565 orang	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00
	Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	91	50.000.000,00			50.000.000,00
	Bineka Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	50.000.000,00			50.000.000,00
	detam Rangka Sumpah Pemuda	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	150	50.000.000,00			50.000.000,00
	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga adat dan Budaya di Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	50	50.000.000,00			50.000.000,00
	Penyienggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	600	500.000.000,00			500.000.000,00
	Pemilihan Duta Pancasila	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	50	50.000.000,00			50.000.000,00
	Kemah Pembinaan Kebangsaan	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	100.000.000,00			100.000.000,00
	Bela Negara	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	50.000.000,00			50.000.000,00
	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan terhadap Forum Strategis	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	110	100.000.000,00			100.000.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kabupaten Sumedang	Jumlah Organisasi yang di bina kategori aktif		565.000.000,00			565.000.000,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	3 dokumen	565.000.000,00			565.000.000,00
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 dokumen	50.000.000,00			50.000.000,00
	Penyusunan produk hukum di bidang Ormas	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup	1	30.000.000,00			30.000.000,00
	Sosialisasi aplikasi SIORMAS dan SPP	Kabupaten Sumedang	Jumlah aplikasi	2	20.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Pagu Indikatif			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.05.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 orang	50.000.000,00			50.000.000,00
	Facilitasi Tes Ulati ASN	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang	30	80.000.000,00			80.000.000,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	125.000.000,00			125.000.000,00
	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	150	125.000.000,00			125.000.000,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	20.000.000,00			20.000.000,00
	MoU Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan	1	20.000.000,00			20.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Sumedang	Jumlah pelatihan konflik sosial yang tertangani	14 potensi konflik	4.267.299.100,00			4.267.299.100,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Sumedang	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 dokumen	4.267.299.100,00			4.267.299.100,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemertahanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemertahanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	835 orang	2.257.299.100,00			2.257.299.100,00
	Forum Koordinasi Pencegahan Transnisi	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	100	50.000.000,00			50.000.000,00
	Pembinaan Disembelisasi	Kabupaten Sumedang	Jumlah kegiatan	1	50.000.000,00			50.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Rincai Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi dan Operasional Pemda 2024 (Pengamanan Terbatas)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	40	150.000.000,00			150.000.000,00
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan dan lain	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	650	928.871.100,00			928.871.100,00
	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	850	928.428.000,00			928.428.000,00
	Berkas Intelektual	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	55	50.000.000,00			50.000.000,00
	Kewaspadaan Diri Daerah (Wacda)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	30	100.000.000,00			100.000.000,00
3.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 orang	75.000.000,00			75.000.000,00
	Rekor Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan rencana aksi	15 rencana aksi	75.000.000,00			75.000.000,00
3.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	335.000.000,00			335.000.000,00
	Pengawasan Orang Asing	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang asing	173	75.000.000,00			75.000.000,00
	Fasilitasi dan Operasional Pemda 2024 (Pengamanan Terbatas)	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	650	100.000.000,00			100.000.000,00
	Fasilitasi Pembentukan PKDM Tingkat Kecamatan	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan	1	100.000.000,00			100.000.000,00
	Memantau Kondisi sosial daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah kegiatan	12	30.000.000,00			30.000.000,00
	Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	Kabupaten Sumedang	Jumlah rekor	30	30.000.000,00			30.000.000,00
3.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1.600.000.000,00			1.600.000.000,00

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target Kinerja	Rincai Indikator			
					APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN (DAK)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Kabupaten Sumedang	Jumlah rekor	38	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00
	Penggiatan Forkopinda	Kabupaten Sumedang	Jumlah kegiatan	20	100.000.000,00			100.000.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	298 orang	2.799.513.500,00			2.799.513.500,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	11 laporan	2.799.513.500,00			2.799.513.500,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	250 orang	435.021.500,00			435.021.500,00
	Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TPPD)	Kabupaten Sumedang	Jumlah dokumen	28	100.021.500,00			100.021.500,00
	Sosialisasi pemilu pemilu, pemilu, perekrutan, tokoh Agama dan Disabilitas	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	250	200.000.000,00			200.000.000,00
	Kemitraan Partai Politik	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	24	60.000.000,00			60.000.000,00
	Jamtorke Partai Politik	Kabupaten Sumedang	Jumlah orang	24	75.000.000,00			75.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 Merupakan Rencana Kerja penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. menyelenggarakan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, serta sosial dan budaya;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. memberi laporan informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik;
- l. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Karena keterkaitan antara Program dan Kegiatan yang berdampak pada IKU Bakesbangpol yaitu :

1. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif yang ditunjang dalam Empat (4) Program dan Empat (4) Kegiatan; dan

2. Tingkat Bina Demokratisasi yang ditunjang dalam satu (1) Program dan satu (1) kegiatan.

yang mana akan bersinergitas kepada kinerja pelayanan baik pada masyarakat di Kabupaten Sumedang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai implementasi Nawa Cita, maka dalam aspek politik dan demokrasi terus dimantapkan dan ditingkatkan implementasi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penguatan lembaga kepresidenan, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, penyempurnaan peraturan perundangan kepresidenan, parpol dan ormas, serta mendorong peningkatan peran kelompok marginal termasuk peran perempuan dalam politik

Arah kebijakan dan strategi pada RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat, dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah penerapan kebijakan *affirmative action kepada* kelompok marginal; peningkatan kapasitas kelompok perempuan; penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya; pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marginal; pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024 Program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumedang Sebagai Berikut:

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama;

- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (hasil cetakan RENJA di SIPD)
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen			Target Capaian Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8														19,721,764,988	
8														8,491,764,988	
8														139,000,000	
8	01	01	2.01								18,878,789,988				
8	01	01	2.01								8,166,764,988				
8	01	01	2.01								128,000,000				
8	01	01	2.01	01	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	3 dokumen	13 dokumen	63,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	65,000,000
8	01	01	2.01	02	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	13 dokumen	10,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	11,000,000
8	01	01	2.01	03	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	13 dokumen	10,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	11,000,000
8	01	01	2.01	04	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	13 dokumen	10,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	11,000,000
8	01	01	2.01	05	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	13 dokumen	10,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	11,000,000
8	01	01	2.01	06	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang Selatan Kotakulon	100 Persen	6 dokumen	13 dokumen	25,000,000	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	30,000,000
01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,782,764,988			2,782,764,988

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	12 bulan	12 dokumen	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.752.764.868	
8	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	0	
8	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	12 laporan	12 dokumen	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	35.000.000	
8	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000												115.000.000
8	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keagapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Keagapannya	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	35 stel	2 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	100.000.000	
8	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 Dokumen	2 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	15.000.000	
8	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.000.000												740.000.000
8	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Pengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Pengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 paket	12 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	0	
8	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 paket	12 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	20.000.000	
8	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 paket	12 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	150.000.000	
8	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Persen	1 paket	12 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	60.000.000	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target
8	01	2.06	06	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai
8	01	2.06	09	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 laporan	250.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai
8	01	2.06	10	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dramis pada SKPD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai
8	01	2.06	11	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 dokumen	12 laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai
8	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.856.000.000		3.000.000.000
8	01	2.07	02	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	15 unit	1 dokumen	1.856.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
8	01	2.07	06	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	30 unit	1 dokumen	1.000.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
8	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							780.000.000		810.000.000
8	01	2.08	02	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	65.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
8	01	2.08	03	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
8	01	2.08	04	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 Persen	1 laporan	12 dokumen	650.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
8	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							820.000.000		900.000.000

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.09	02	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang Kotakulon	100 Persen 10 Unit 3 dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	310.000.000
8	01	01	2.09	06	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Perakitan dan Mesin lainnya yang Diperiksa	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang Kotakulon	100 Persen 20 Unit 3 dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	80.000.000
8	01	01	2.09	09	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Diperiksa/Orheabilitas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang Kotakulon	100 Persen 1 unit 3 dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	310.000.000
8	01	01	2.09	10	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Diperiksa/Orheabilitas	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang Kotakulon	100 Persen 1 unit 3 dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	200.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										1.600.000.000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										1.600.000.000
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen 1 Keluaran 1 laporan	0	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 persen	0
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikut Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen 150 Orang 1 laporan	1.590.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100 persen	1.600.000.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA										1.410.000.000
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peringatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										1.410.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
5.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	50 Orang	1 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100 persen
5.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	150 Orang	1 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100 persen
8.01.04												
8.01.04												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
8.01.04												
5.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	525 Orang	1 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Ormas yang aktif	100 persen
8.01.05												
8.01.05												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
8.01.05												
5.01.05	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik Lingskup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	100 persen	1 Dokumen	1 laporan	PENDAPATAN ASU DAERAH		Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik Lingskup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8.01.05	2.01.03	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyagunaan Narkotika	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyagunaan Narkotika	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		100 persen	0 Orang	1 laporan	0	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen	0
	2.01.04	Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8.01.05	2.01.04	Peaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyagunaan Narkotika	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyagunaan Narkotika	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kodakulon	100 persen	55 Orang	1 laporan	500.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	100 persen	550.000.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												6.620.000.000
8.01.06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												6.620.000.000
8.01.06	2.01.03	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kodakulon	100 persen	15 Orang	1 laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 persen	120.000.000
8.01.06	2.01.04	Peaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kodakulon	100 persen	500 Orang	1 laporan	6.200.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100 persen	6.500.000.000
TOTAL										18.878.769.988				19.721.764.988

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Sesuai tugas Pokok dan fungsi serta melihat dan mencermati latar belakang dan fenomena- fenomena saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Tujuan sebagai berikut :

“TERCIPTANYA KABUPATEN SUMEDANG YANG KONDUSIF DAN DEMOKRATIS”.

Tujuan diatas, secara umum mengandung makna terciptanya Masyarakat Sumedang yang Kondusif dan Demokratis guna mendukung lancarnya pelaksanaan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan makna secara harfiah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi

Tujuan penetapan di maksud adalah guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sebagai cermin apa yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
- (2) Sebagai cermin dalam memberikan arah dan fokus strategis yang jelas terhadap resfek kerja dan unjuk kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap layanan masyarakat Kabupaten Sumedang.
- (3) Sebagai itikad dalam optimalisasi potensi yang ada terhadap kinerja masa depan.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan, *sebagai berikut*;

- 1) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
- 2) Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
- 4) Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan
- 5) Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
- 6) Membangun hubungan yang harmonis dan manusiawi di antara pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan berakhlak mulia.

3.2 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2024-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Permasalahan dalam Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 3) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.2.a di bawah ini :

Tabel 3.2
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 3. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 4. Gangguan PEKAT masih tinggi 5. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada 6. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 7. Status Covid 19 di Kabupaten Sumedang	• Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1. Peran ormas di masyarakat belum optimal 2. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM 3. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing	• pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal
3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi uu tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politik 4. Belum optimalnya tim pemantau perkembangan politik di daerah kabupaten sumedang 5. Status kebangsaan dan politik di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional (meliputi Pemilu, Pilkada serentak tahun 2024) 6. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social 7. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 8. Belum terbentuknya sistem informasi ormas	• Penyederhanaan birokrasi dan transformasi digital

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Daerah Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN TARGET BENJILAH OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL		DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						94.534.342.303,00								94.035.195.945,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						94.534.342.303,00								94.035.195.945,00	
	8.01.01	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	A nilai				5.265.017.288,00						A nilai	5.348.670.890,00		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 laporan				125.391.259,00			-		Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	13 laporan	137.378.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen					44.270.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	DANA TRANSFER UMUM-LAJANA BAGI HALUJIL	-		Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	48.696.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRORISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan			6 Laporan	51.491.250.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penguatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan an untuk m ewujudkan brokrasi yang dramis, efektif dan efisien	6 Laporan	56.059.000.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	2.370.708.080.00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penguatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan an untuk m ewujudkan brokrasi yang dramis, efektif dan efisien	10 Laporan	2.373.708.080.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan			15 Orang/bulan	2.340.708.080.00	Kab. Sumedang, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penguatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan an untuk m ewujudkan brokrasi yang dramis, efektif dan efisien	14 Orang/bulan	2.340.708.080.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAT OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKTIKSIAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencapaian dan Peningkatan Keuangan SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD																
	8.01.01.2.02.0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Laporan	22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan			12 Laporan	50.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	12 Laporan	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Pertanggungjawaban Berang Mula Daerah pada SKPD	12 Laporan	6	7	12 Laporan	50.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	12	13	14	15	16	17
													Inovasi Pelayanan Publik dan Pencapaian Peningkatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemertahan an untuk m eeujudkan brokrasi yang dramatis, efektif dan efisien	Asapatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	12 Laporan	55.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dokumen			6 dokumen	188.000.000.00			-		Inovasi Pelayanan Publik dan Pencapaian Peningkatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemertahan an untuk m eeujudkan brokrasi yang dramatis, efektif dan efisien	Asapatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	6 dokumen	206.800.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keorganiannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Keorganiannya	3 Paket			1 Paket	50.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-		Inovasi Pelayanan Publik dan Pencapaian Peningkatan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemertahan an untuk m eeujudkan brokrasi yang dramatis, efektif dan efisien	Asapatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Paket	55.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA UPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KESANGKA PENDANAAN						KELOMBOC SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	1 Dokumen	8.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			4 Orang	130.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	4 Orang	143.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan			8 Laporan	539.450.950,00			-	Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	8 Laporan	539.460.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2 06 0002	Penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kantor	Jumlah Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	1 Paket	44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAMIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Perawatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	16.000.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Paket	16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	130.000.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Paket	143.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	45.000.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Paket	49.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perondang-undangan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRANS TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	16.480.000.00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ejekutif dan efisien	1 Dokumen	18.106.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	246.666.900.00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ejekutif dan efisien	1 Laporan	182.144.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000.00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ejekutif dan efisien	1 Dokumen	11.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REKUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	1 Dokumen			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Dokumen	100.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Daerah Peningkatan Digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	1 Dokumen	62.230.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 laporan			30 laporan	760.000.000.00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Daerah Peningkatan Digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	41 laporan	686.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		18 Unit			18 Unit	460.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perubahan Perilaku Daerah Peningkatan Digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	18 Unit	200.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	90.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokasi yang dinamis, efektif dan efisien	Asapatur Badan kegiatan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	6 Unit	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit			14 Unit	100.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokasi yang dinamis, efektif dan efisien	Asapatur Badan kegiatan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	15 Unit	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	150.000.000.00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokasi yang dinamis, efektif dan efisien	Asapatur Badan kegiatan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Unit	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSI OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	8 01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3 Laporan	748.400.000.00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perataan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	3 Laporan	878.300.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	60.000.000.00	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perataan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Laporan	66.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	80.000.000.00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Perataan Daerah Peningkatan n digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan brokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Laporan	88.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRAS TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	608.480.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua KewDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	1 Laporan	724.308.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	380.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	4 Laporan	473.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Persihan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pencatannya	24 Unit			8 Unit	150.000.000,00	Kab. Sumedang Semua Kecamatan Semua KewDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Daerah Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintah an untuk m ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	8 Unit	220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0000	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya														

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 tahun 2019. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023 dengan tujuannya untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang selama tahun 2024.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Sumedang, 31 November 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001